

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak akan bisa lepas dari komunikasi, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Arus informasi meluas ke seluruh dunia, globalisasi informasi dan media massa pun menciptakan keseragaman pemberitaan maupun preferensi acara liputan yang akhirnya menjadi santapan jiwa yang dapat mempengaruhi wawasan, pola pikir serta ideologi manusia, sehingga informasi menjadi senjata yang sangat kuat untuk memperoleh kekuasaan dengan taktik menggiring ideologi manusia melalui pemberitaan dalam media komunikasi massa antara lain media cetak, media elektronik, dan media *online*. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas (Bungin, 2006, p. 71)

Industri media di Indonesia sudah berkembang sejak akhir tahun 190an. Reformasi menjadi titik melesatnya perkembangan bisnis media. Dalam lima belas tahun pertumbuhan industri media di Indonesia telah didorong oleh kepentingan modal yang mengarah pada oligopoli dan pemusatan kepemilikan. Saat ini dua belas kelompok media besar mengendalikan hampir semua kanal media di Indonesia, termasuk di dalamnya penyiaran, media cetak dan media *online*, mereka adalah

MNC Group, Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group. BeritaSatu Media Holdings, Grup media, MRA Media, Femina Group dan Tempo inti Media (Nugroho, Putri, & Laksmi, Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia, 2013).

Media memainkan peran penting dalam kehidupan public saat ini. Bahkan secara etimologis kata media memiliki makna *locus publicus* (sebuah ranah public). Akan tetapi, seperti yang mungkin juga terjadi di negara-negara lain, media di Indonesia tampak semakin digerakan oleh motif keuntungan hal ini didasari oleh konglomerasi media yang terjadi di Indonesia para pemilik media. Kekuatan media yang begitu besar sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan mengakibatkan media menjadi sebuah ranah yang diperebutkan berbagai kelompok kepentingan mulai dari politik dan bisnis hingga blok-blok religious-fundamentalis yang bertarung untuk mendapatkan pengaruh, meskipun memang kita bisa melihat dengan jelas satu pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih dibaanding lainnya. Media terlihat dikendalikan akumulasi pemilik modal, sehingga memungkinkan industri untuk mengelak dari peraturan-peraturan yang ada, yang berdampak pada penguatan bisnis media melalui akuisisi kanal maupun perusahaan media lain dengan jumlah yang tak terbatas.

Pemusatan yang terjadi di industri media terjadi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari kepentingan modal yang mendorong perkembangan industri media di Indonesia. Oligopoli media yang terjadi saat ini tentu membahayakan hak warga Negara akan informasi, karena industri media sudah berorientasi keuntungan dan

perusahaan-perusahaan media telah mewakili gambaran bisnis yang menguntungkan yang dapat dibentuk oleh kepentingan pemilik media oleh karena itu bisnis media menjadi senjata yang ampuh bagi mereka yang ingin mencari kekuasaan. Hal ini menjadi semakin kuat terutama pada kasus sejumlah pemilik media yang juga terafiliasi dengan dunia politik. Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang juga pemilik Viva Group dan Surya Paloh, pendiri partai politik Nasdem yang juga pemilik Media Group, adalah dua contoh nyata atas tren ini.

Kepentingan pemilik-pemilik media ini dapat membahayakan hak warga negara terhadap media, karena mereka menggunakan media sebagai alat kampanye politik untuk mempengaruhi opini publik, atau secara sederhana media telah menjadi sebuah mekanisme di mana para pebisnis dan politisi menyampaikan kepentingan mereka dan pada saat yang sama juga mengambil profit dari bisnisnya. Jika kita berfikir kritis padahal sejatinya frekuensi adalah milik publik dan hak seluruh warga Negara Indonesia, frekuensi bukan milik segelintir penguasa media.

Pemilik media membuat media menjadi sebuah komoditas, dengan pemirsa (warga Negara) diperlakukan hanya sebagai konsumen, bukan sebagai warga Negara yang sah akan hak-haknya. Sebagai alat untuk kekuasaan, media menanggung bias yang tidak dapat dihindari karena adanya intervensi dari pemilik media (Nugroho, Putri, & Laksmi, Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia, 2013). Hingga saat ini sudah banyak kasus media nakal yang terjadi isu politik kerap menjadi santapan media-media, perkawinan antara politik dan media seperti sudah

mendarah daging dalam dunia jurnanisme Indonesia. Media yang seharusnya memberitakan informasi yang berimbang (*cover bothsides*) namun dalam realitasnya media kerap melakukan pemingkaian (*framing*) dalam menyajikan berita sehingga terlihat memiliki keberpihakan pada salah satu pihak yang tentu lebih menguntungkan media beserta pelaku media tertentu.

Ada kejadian yang menarik perhatian penulis, kejadian ini ramai dibicarakan di media sosial dan banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia. Presiden RI Joko Widodo menghadiri Dies natalis ke-68 Universitas Indonesia. Saat acara berlangsung, seorang mahasiswa UI berdiri dan mengacungkan kertas sebesar map berwarna kuning ke arah Presiden. Aksi kritik tersebut dilakukan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa yang menggelar aksi tersebut sebagai cara untuk menyampaikan sebuah kritik dengan menggunakan simbol kartu berwarna kuning sebagai peringatan untuk Presiden Jokowi bahwa masih banyak program dan janji Presiden yang belum terlaksana, namun sayang aksi ini berujung ribut dan di Zaadit pun di halau Paspampres. pada saat itu juga media *online* ramai memuat berita tentang isu ini berbagai komentar hadir di masyarakat, isu ini menyebabkan kontroversi di masyarakat ditambah dengan banyaknya portal berita *online* yang memberitakan hal ini dengan cara dan gayanya masing-masing. sangat mungkin bahwa cara media melakukan pemingkaian dalam memberitakan kartu kuning terhadap Jokowi ini dipengaruhi oleh para pemilik media, untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan, seperti menurut Shoemaker dan Reese, sikap politik

pelaku media merupakan salah satu hal yang mempengaruhi isi pemberitaan suatu media (Shoemaker & Reese, 2014).

Pembingkaiian (*framing*) negatif atau positif media *online* menyajikan berita tersebut mempengaruhi kontroversi yang terjadi di masyarakat mengenai tindakan Zaadit mengkritik Presiden RI Joko Widodo dengan mengacungkan kartu kuning. Kritik ini menjadi bahan pemberitaan yang menarik, dimana banyak media yang memuat pemberitaan mengenai tindakan Zaadit ini muncul asumsi-asumsi masyarakat tentang zadit mulai dari mendukung hingga menganggap bahwa tindakan yang Zaadit lakukan tidak sopan, pada akhirnya tindakan Zaadit menuai pro dan kontra. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis pembingkaiian (*framing*) terhadap media *online* dan bagaimanakah media tersebut mengemas tindakan Zaadit Taqwa. Karena dirasa oleh penulis tindakan yang dilakukan Zaadit merupakan tindakan yang unik dan menarik bagi media tentunya untuk melakukan framing terhadap isu ini, sehingga dapat diketahui bagaimana cara media *online* berpihak, dalam menyajikan pemberitaan untuk salah satu pihak.

Kejadian kritik kartu kuning tersebut banyak disaksikan oleh media-media massa dan tentu mereka memiliki keberpihakan terkait politik, ada 2 media yang mendukung pemerintahan presiden Jokowi pada saat itu, yaitu media *online* www.Kompas.com Kompas Gramedia Group yang dimiliki oleh Jacob Oetama dan www.Detik.com Trans Corpora milik Chairul Tanjung secara bersama-sama menyebarluaskan peristiwa ini, dua aktor tersebut ikut memuat berita kritik kartu

kuning Jokowi di media yang mereka miliki. Tentunya, kedua media tersebut menkonstruksi berita dengan caranya masing-masing. Konstruksi berita yang dilakukan oleh media tersebut salah satunya dengan melakukan pembingkaiian atau framing. Hal ini dapat ditinjau dari kedua media tersebut pernah memiliki kecenderungan berpihak pada Jokowi sebagaimana kepemilikan kedua media tersebut dimana kedua pemilik media tersebut sejak pemilu Presiden tahun 2014 kedua media tersebut ikut berperan dalam mendongkrak citra serta popularitas Jokowi di media untuk memenangkan pemilu tersebut. Adapun penelitian terdahulu terkait Framing yaitu berupa jurnal oleh Regia Fiorentina, Mayasari, dan Fajar Hariyanto yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan “REUNI AKBAR 212” Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online Kompas.com dengan Republika.co.id tahun 2017. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, dalam penelitian ini penulis mencari perbedaan dalam cara *framing* suatu isu tergantung objek dan isu juga kepentingan yang dimiliki objek penelitian, dimana dalam penelitian ini Kompas.com dan Detik.com dengan isu kritik kartu kuning terhadap presiden Jokowi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, framing pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media massa tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *framing* terhadap pemberitaan kritik kartu kuning terhadap Jokowi dilakukan oleh kedua media *online* tersebut (Kompas.com dan Detik.com) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperlihatkan cara kedua media *online* tersebut yaitu Kompas.com dan Detik.com dalam melakukan *framing* terhadap pemberitaan kritik kartu kuning terhadap Jokowi .

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi banyak manfaat secara teoritis maupun secara sosial, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai pembingkaiian terhadap berita kritik kartu kuning terhadap Jokowi yang di lakukan oleh media online.
2. Manfaat sosial penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada publik tentang konstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh media massa, agar publik tidak dengan begitu saja mengkonsumsi berita, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih berita serta memberikan penilaian kritis terhdap berita yang disampaikan oleh media.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Politik Pemberitaan

(Sudibyo, 2001) menyebutkan produksi teks media dipusatkan pada proses pembentukan berita (*newsroom*). Newsroom tidak dipandang sebagai ruang yang hampa melainkan proses pembentukan berita sebaliknya adalah proses yang rumit dan banyak faktor yang berpotensi untuk mempengaruhinya, dikarenakan banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, sehingga akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media (Sudibyo, 2001, p. 7). Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna (Hamad, 2004, p. 11). Realitas yang ditampilkan media tidak dipahami sebagai seperangkat fakta, tetapi hasil dari pandangan tertentu dari pembentukan realitas (Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar analisis Teks Media, 2001, p. 29). Media memegang peran khusus dalam mempengaruhi budaya tertentu melalui penyebaran informasi. Walter Lippman menyebutkan fungsi media sebagai pembentuk makna di mana interpretasi media massa akan berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka (Ruben, 1992, p. 14), ia menyadari bahwa fungsi media dalam membentuk suatu realitas sangat berpengaruh terhadap khalayak (Lippman, 1998, pp. 3-28). Harus dipahami bahwa suatu peristiwa adalah suatu realitas, menurut Tuchman berita pada dasarnya adalah realitas yang telah dikonstruksikan (Sudibyo, 2001, p. 65).

Berita memberikan konsep terhadap suatu realitas, karenanya berita melihat realitas sebagai hasil konstruksi manusia (Hartley, 1982, p. 12).

Menurut (Hartley, 1982, p. 36) ada dua hal yang perlu dipahami mengenai suatu berita, *pertama* berita tidak hanya sekedar informasi namun dalam proses pembentukan berita itu terdapat berbagai aspek kepentingan yang mempengaruhi konteks dari berita tersebut. *Kedua* makna merupakan hasil dari suatu interaksi, yang berarti sebuah berita tidak berarti apapun ketika berita tersebut tidak dibaca oleh khalayak karena belum dimaknai oleh khalayak oleh karenanya ada konteks sosial dalam suatu berita agar sebuah berita dapat dibaca dan dipahami oleh khalayaknya. Isi media memang didasarkan pada kejadian di dunia nyata, namun media menampilkan dan memprioritaskan elemen tertentu, dan logika structural media dipakai dalam melakukan prioritas terhadap elemen tersebut. Hal ini dapat memungkinkan media untuk cenderung membatasi dan menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber berita, dan memberi porsi yang berbeda terhadap perspektif lain, yang kemudian terjadi adalah terbentuknya suatu prioritas tertentu terhadap pemaknaan suatu realitas (Sudibyo, 2001, p. 31).

Dalam (Sudibyo, 2001) adanya pengaruh dari segi eksternal maupun internal dalam pembentukan isi media hal ini akan sangat berdampak pada gaya pemberitaan yang akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa, media memiliki orientasi atau tujuan tertentu dalam membentuk suatu berita, dalam studi media ada 3 pendekatan untuk menjelaskan isi media.

Pertama Pendekatan Politik – Ekonomi (the political-economy approach).

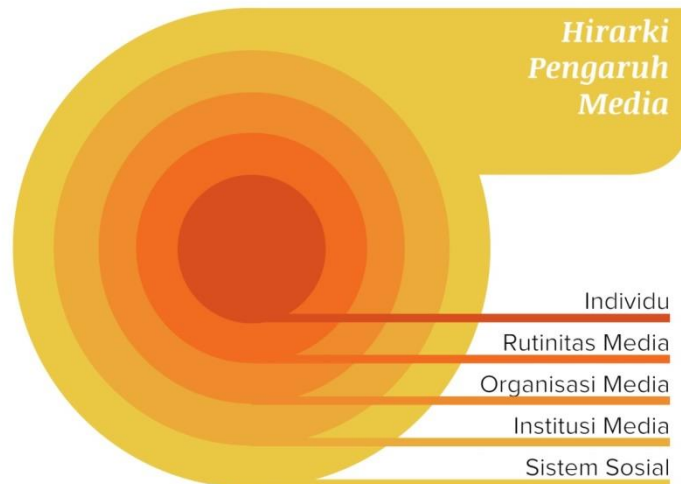
Pendekatan ini berpendapat bahwa isi suatu media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi serta politik diluar pengelolaan media, factor seperti pemilik media, pemilik modal, dan pendapatan media dalam pendekatan ini dianggap lebih berpengaruh dalam menentukan wujud dari isi suatu media, factor-faktor tersebut yang menentukan penyeleksian isi media, apa yang media tampilkan atau media beritakan serta arah kecenderungan pemberitaan suatu media (keberbikahan) (Sudibyo, 2001, p. 2).

Kedua Pendekatan Organisasi (organizational approaches). Pendekatan ini sangat bertolak belakang dengan pendekatan ekonomi politik yang berasumsi bahwa isi media selebihnya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal dari luar pengelola media, pendekatan ini justru melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan serta produksi isi media atau pemberitaan. Dalam pendekatan ini media memproses suatu berita berdasarkan mekanisme yang ada dalam ruang redaksi, sehingga arah pemberitaan dari suatu media menurut pendekatan ini tidak dipengaruhi oleh ekonomi serta politik melainkan berdasarkan nilai berita yang tinggi setelah masuk kedalam kategori berita yang memiliki nilai tinggi melalui mekanisme di ruang redaksi, dengan kata lain proses produksi berita hayalak mekanisme di ruang redaksi semata, dimana setiap organisasi berita mempunyai pola dan mekanisme tersendiri sehingga mekanisme bersifat internal (Sudibyo, 2001, p. 3).

Ketiga Pendekatan Kulturalis (Culturalist Approach). Pendekatan ini merupakan gabungan dari kedua pendekatan sebelumnya pendekatan ekonom-politik

dan pendekatan organisasi, dalam pendekatan ini proses serta mekanisme pembuatan berita dilihat sebagai hal yang rumit dengan melibatkan faktor internal media (rutinitas organisasi media) sekaligus juga faktor eksternal di luar diri media. Sehingga walaupun media mempunyai mekanisme atau pola dalam menentukan suatu pemberitaan tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik dari pihak eksternal media (Sudibyo, 2001, p. 4). Nilai yang dianggap penting bagi pemegang kekuasaan disebarkan melalui media sehingga isi media mencerminkan ideology pihak yang berkuasa (Shoemaker & Reese, 2014, p. 299).

Menurut teori hierarki pengaruh isi media yang diperkenalkan oleh Shoemaker dan Stephen D. Reese. Yang juga menjeaskan tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal dan eksternal, teks media dipengaruhi oleh beberapa level pengaruh isi media. Yaitu mulai dari yang terkecil pada level individu pelaku media, praktik rutinitas, organisasi media, institusi sosial, hingga yang terakhir, sistem sosial. Masing masing lingkaran tersebut menurut Shoemaker dan Reese memiliki karakter yang berbeda namun keseluruhannya membentuk system yang tak dipisahkan satu sama lain. Menurut (Shoemaker & Reese, 2014) Yang disajikan oleh media, pada dasarnya merupakan akumulasi dari beragam pengaruh, Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, meringkas dan mengidentifikasi 5 faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan serta kebijakan redaksi. :



Sumber: *www.remotivi.or.id* (2018)

1. Individu

Pada level individu, selain sikap politik, terdapat beberapa variabel yang diidentifikasi Shoemaker dan Reese dapat memengaruhi mekanisme mediasi berita. Variabel pertama, adalah latar belakang dan karakteristik dari pelaku media (gender, etnis, orientasi seksual, kelas sosial dan latar belakang pribadi yang berkaitan dengan status sosial ekonomi, karir, serta pendidikan). Kedua, nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh pelaku media, (misalnya agama: orientasi religius, sikap politik). Ketiga, adalah “peran” dan “bingkai etis” yang dipilih pelaku media dalam situasi tertentu. Dalam dimensi terakhir di lapisan individu, mengutip Bernard Cohen (1963),

Shoemaker dan Reese mengatakan bahwa, dalam mekanisme mediasi pesan, peran pelaku media terbagi menjadi dua, yaitu yaitu mereka yang memilih untuk “netral” atau sebagai “partisipasi” dari peristiwa. Penelitian Johnstone et. Al (1972) mengatakan wartawan yang menganggap dirinya “netral” hanyalah sarana transmisi pesan belaka. Wartawan jenis ini akan menghindari peristiwa dengan materi yang belum diverifikasi dan lebih berkonsentrasi pada khalayak luas. Sedangkan, wartawan “partisipasi” akan lebih memiliki semangat kritisisme serta melakukan penyelidikan atas berbagai klaim. Mereka tidak sekedar mendudukkan diri sebagai “perantara”. (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 230-231) . Dalam bingkai etis, Shoemaker dan Reese mengutip hasil penelusuran atas esensi jurnalisme yang dilakukan oleh Kovach dan Rosentiel (2001) Kepercayaan pada bingkai etis, seperti elemen jurnalisme, sangat memengaruhi bagaimana seorang individu jurnalis memproduksi berita. Meski pada praktiknya terdapat beberapa hal yang masih dalam wilayah perdebatan, termasuk semakin merebaknya media daring, dengan kultur internet, yang membuat konsepsi etika jurnalisme yang dapat diterapkan secara umum dan universal semakin sulit dirumuskan (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 234-235).

2. Rutinitas Media

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. terbentuk oleh tiga unsur yaitu; sumber berita (suppliers);

organisasi media (processor); dan audiens (customers). Dalam pembentukan rutinitas media, tarik-menarik ketiga unsur tersebut merupakan sebuah respon praktis atas kebutuhan organisasi media. Untuk mempertahankan eksistensinya, media harus menciptakan selisih antara biaya produksi berita dengan penjualannya. Dengan kata lain, menjaga keseimbangan antara proses produksi berita dengan pemasarannya. Upaya menciptakan pola yang sistematis dalam rangka mencapai keseimbangan, kemudian melahirkan “rutinitas media”, di mana organisasi media harus beradaptasi pada berbagai kendala yang dihadapi, dan rutinitaslah yang mengoptimalkan hubungan antara organisasi media dan lingkungannya (Shoemaker dan Reese: 167-168). Rutinitas media yang terbentuk akan membentuk mekanisme dan proses penentuan berita dalam media itu sendiri, setiap media mempunyai standar atau ukuran tersendiri untuk menentukan apa yang disebut berita, seperti ciri-ciri berita yang baik, atau kriteria kelayakan berita ((Sudibyo, 2001, p. 8)

3. Organisasi Media

Organisasi menempati posisi yang sangat dominan dalam mekanisme mediasi pesan. Individu pekerja media dan rutinitas tunduk pada struktur dan kebijakan organisasi atau institusi yang merangkum mereka. Pemegang kekuasaan organisasi tertinggi suatu media dipegang oleh pemilik media,

entah perseorangan atau korporasi. Seperti yang disebutkan oleh Sudibyo masing-masing komponen dalam organisasi media bisa mempunyai kepentingan sendiri-sendiri (Sudibyo, 2001, p. 9) . Kuasa organisasi ini dapat tampil, misalnya, melalui perekrutan editor, serta seleksi/promosi individu-individu yang dianggap loyal untuk menempati posisi strategis dalam penentuan berita. Implikasi dari hal tersebut adalah terciptanya “swa-sensor”, penyensoran yang dilakukan oleh awak media mereka sendiri (Shoemaker & Reese, 2014, p. 163). Pada titik ini, isu “otonomi” atau independensi yang seharusnya dimiliki jurnalis menjadi relevan.

4. Institusi sosial (eksternal)

Institusi sosial, yang bekerja dari luar organisasi media. Media adalah bagian dari institusi sosial yang terhubung dengan kelembagaan sosial lain yang memiliki kuasa tertentu. Relasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi proses mediasi pesan. Shoemaker dan Reese meminjam argumen Manuel Castells bahwa media adalah ruang yang terlembagakan secara umum, dengan logika dan organisasi yang dipengaruhi oleh struktur politik (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 99-103). Menurut (Sudibyo, 2001) ada beberapa faktor yang membuat pihak ekstramedia berpengaruh dalam proses mediasi pesan:

1. Sumber berita

Sumber berita dipandang bukan sebagai pihak yang netral dalam menyampaikan informasi terhadap media, namun sumber berita juga mempunyai kepentingan tersendiri demi keuntungan dirinya seperti meningkatkan citra, memenangkan opini public dan hal-hal lain yang dapat menguntungkan sumber berita, sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sumber berita dapat dengan bebas memilih informasi yang baik juga menguntungkan bagi dirinya dan membungkam informasi yang menurut dirinya tidak patut untuk di muat di media. Hal ini kerap tidak disadari oleh media, sumber media dapat mengarahkan pemberitaan sesuai dengan yang ia mau hal ini membuat pemberitaan akan menguntungkan sang sumber berita.

2. Sumber Penghasilan media

Sumber Penghasilan media ini bisa berupa iklan atau pelanggan serta pembeli media. Media yang harus bertahan tentu harus berkompromi dengan sumber penghasilan mereka, kadangkala media harus menuruti sumber penghasilan yang mempunyai kepentingan, misalnya saja media tidak akan memberitakan hal-hal buruk mengenai pengiklan dan sebaliknya media akan terus memuat isu-isu yang akan mendongkrak citra baik atau penjualan pihak pengiklan.

3. Pemerintah dan lingkungan bisnis

Pengaruh dari pemerintah dan lingkungan bisnis ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media, contohnya dalam pemerintahan yang otoriter media tidak bisa dengan bebas mengkritik pemerintah atau memuat berita yang akan berdampak buruk bagi pemerintah, jika media ingin terus bertahan maka harus tetap tunduk kepada aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang akan menyetujui suatu berita yang patut atau tidak patut untuk di muat di media itu sendiri, sementara itu di negara yang demokratis dan menganut liberalisme, negara tidak terlalu ikut campur tangan, justru pengaruh yang besar akan terletak pada lingkungan pasar dan bisnis

5. sistem sosial

Shoemaker dan Reese meletakkan sistem sosial sebagai struktur yang menghubungkan antara masyarakat secara umum dengan institusi yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Sistem sosial sangat luas. Shoemaker dan Reese sendiri menyederhanakannya dalam empat sub-sistem: ideologi, ekonomi, politik, dan kultural (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 69-74). Keempat wilayah tersebut berada dalam wilayah paling makro dan kadang sulit untuk dideteksi. Kadang kita akan cenderung menganggap sesuatu yang umum, lumrah saja terjadi, sesuatu yang secara hegemonik akan kita terima sebagai kewajaran, *taken for granted* (Shoemaker & Reese, 2014, p. 94).

1.5.2 Pengaruh Ideologi Dalam Pemberitaan

Meurut gambaran marx, ideology merupakan sarana yang digunakan ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai suatu yang alami dan wajar. Ideologi ini menjaga masyarakat berada dalam kesadaran palsu, kesadaran manusia tentang siapa dirinya, bagaiman mereka berelasi dengan bagian llain dari masyarakat, dan pengertian kita tentang pengalaman sosial dihasilkan oleh masyarakat dan lingkungan tempat kita dilahirkan (Fiske, 1990, p. 239). Ideology merupakan sarana yang diguakan untuk ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebsgai alami dan wajar.

Sementara itu Shoemaker dan rese melihat ideology sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi isi media. Ideologi diartikan sebagai suatu mekanisme simbulik yang berperan sebagai kekuatan pengikat dalam masyarakat. Tingkat ideology menekankan pada kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi media itu bekerja (Shoemaker & Reese, 2014, p. 223). Hal ini tidak dapat lepas dari unsur nilai, kepentingan dan kekuatan atau kekuasaan apa yang ada dalam suatu media, kekuasaan tersebut berusaha dijalankan dan disebarkan melalui media sehingga media tidak dapat lagi bersifat netral dan berpihak. Media bukanlah ranah netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang (Sudiby, 2001, p. 55), dari pernyataan

tersebut dapat disimpulkan bahwa media digunakan sebagai senjata oleh kelompok pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat.

1.5.3 Peran Media dalam Pemerintahan

Secara umum, Media atau pers nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan kritik sosial. Pers nasional berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Disamping itu, media diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Media juga idealnya harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran, menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM (hak asasi manusia), serta menghormati kebhinekaan. Bahkan sebagai pilar keempat untuk menompang kehidupan demokrasi, media mesti memiliki hak *privilese* tertentu, yaitu hak kritik, hak control, dan hak koreksi. Juga, hak khusus bersyarat yang memungkinkan media bersifat transparan dalam pemberitaanya. Dengan berbagai cara tersebut media dapat menjadi penjaga, pemantau dan pengontrol terhadap jalanya pemerintahan atau mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dan pelaksanaan demokrasi (Muis, 2000, p. 56).

Media dianggap mampu mengontrol pemerintah dan masyarakat, yang dikenal sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate democracy*) atau anjing penjaga (*watchdog*), setelah lembaga eksekutif, yudikatif dan

legislative. Sementara itu payung hukum pers sebagai kekuatan keempat demokrasi diamanatkan di UU No. 40/1999 tentang pers. Isi pokoknya sebagai berikut;

Pertama, jika UU Pokok Pers yang sebelumnya memberi otoritas kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan, pengatur, pengawas dan pengendali pers, UU Pers hasil gerakan reformasi mengamanatkan pers yang mengontrol pemerintah dan pemerintah tidak lagi mencampuri penyelenggaraan pers. *Kedua*, izin penerbitan pers tidak diperlukan, *Ketiga*, bagi siapa saja yang melakukan penyensoran, pembredialan termasuk yang menyatakan korporasi perusahaan pers sebagai terlarang, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. *Keempat*, pers dan wartawan yang melakukan tugas jurnalistik untuk kepentingan umum, jika salah tidak dikriminalkan. Sanksinya diselesaikan dengan klarifikasi berupa hak jawab. Bila tidak puas atas keputusan Dewan Pers pengadu dapat menempuh jalur hukum dan media teradu dapat dipidana denda paling banau Rp 500 juta. *Kelima*, Dewan Pers independen dan diberi kewenangan antara lain menjaga kemerdekaan pers, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers akibat pemberitaan pers.

Secara nyata pers mendapat jaminan yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya, yaitu; *Pertama*, melayani sistem politik dengan menyediakan ruang diskusi bagi masyarakat untuk berdebat terutama dalam

masalah kebijakan public. *Kedua*, menjadi anjing penjaga (*watchdog*) dan hak-hak peorangan warga negara (control sosial), dan *Ketiga*, membiayai finansial secara mandiri. Media seharusnya menyediakan informasi independen dan idealnya menjadi *watchdog* terhadap segala potensi penyelewengan kekuasaan dan kebohongan (Croteau & Hoynes, 2000, p. 6). Tetapi media acap berdiri di titik yang riskan. Ia menjadi ruang yang diperebutkan dan selamanya tunduk pada kepentingan-kepentingan di belakangnya.

Bahkan pasal 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers Menyebutkan bahwa pers berasaskan prinsip-prinsip deokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dalam pasal 3 ayat (1) fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Ditambah lagi ayat (2) yang menyebutkan bahwa pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Untuk menjalankan fungsinya, pers diberi jaminan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) undang-undang yang sama. Jadi, kemerdekaan pers guna mewujudkan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeuarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 terjamin dan dilindungi hukum, nyatanya masih kabur.

1.5.4 Problem Kredibilitas dalam Jurnalisme online

Ekmer-Dewit (1995) menyatakan bahwa internet atau ruang maya adalah ruang bayang tempat data-data berada (Allan, 2006), internet, web, matriks, *cloud*, data elektronik dan informasi super cepat semuanya ada dalam berbagai bentuk dalam konteks-konteks berbeda yang membuat setiap hari penuh dengan artikel berita, pidato politik dan dunia imajiner.

Internet memberikan pengaruh yang besar pada peningkatan jumlah portal berita *online*, khususnya bagi mereka yang menggunakan ponsel yang memiliki koneksi internet atau *smartphone*, demikian juga profesi sebagai jurnalis *online* menjadi semakin populer. Namun dikatakan dalam (Nugroho, Putri, & Laksmi, Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia, 2013) kecepatan dan perkembangan berita yang *real-time* selalu menjadi prioritas di *media online*. Berita tidak lagi diukur dengan kualitas konten, namun dihadirkan dengan kecepatan dan informasi langsung, hal ini membuat pola penyampaian dan penerimaan pesan berubah, keberadaan informasi yang disajikan melalui internet dapat menjadi sebuah hal yang dapat menimbulkan keraguan akan kredibilitas dari informasi yang hadir dalam internet, Teknologi komunikasi yang baru telah mematahkan kesakralan dari jurnalisisme (Moretzsohn, 2006).

Kredibilitas sebuah informasi dari media baru dan kemungkinan manipulasi justru datang dari jurnalisisme partisipatif atau yang biasa dikenal dengan *online journalism* karena ada kemungkinan jurnalis dapat menyertakan agenda tersembunyi mereka masing-masing. Namun pengakuan

bahwa jurnalis merupakan pilar keempat dan peranya sebagai mediator masih memiliki kekuatan sendiri (Moretzsohn, 2006).

Sementara reliabilitas dan kredibilitas juga punya kriteria-kriteria lain seperti tingkat konsistensinya dalam fungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga sebuah validitas, reliabilitas dan kredibilitas bisa menjadi sesuatu yang memiliki parameter namun harus tetap dibuktikan berdasarkan observasi lebih lanjut yang dilakukan oleh pengguna media (Penrod, 2005), namun sayang hal ini kerap diabaikan oleh pelaku media online khususnya jurnalis karena berlomba dengan kecepatan selain itu sebuah berita juga memiliki persyaratan dan kriteria lain untuk bisa lolos dan mendapat pengakuan akan kebenarannya (Pavlik, 2001).

Para jurnalis pun sebenarnya ada dibawah tekanan dalam bekerja untuk kepentingann media akhirnya para jurnalis menjadi lemah, pekerjaan jurnalis sebagai sebuah Komitmen menjadi semu akibatnya mereka lebih peduli pada jurnalis sebagai sebuah pekerjaan, dari pada jurnalis sebagai sebuah Komitmen yang berperan penting mewakili publik. Situasi industri media yang tumbuh sebagai institusi yang berbasis keuntungan, maka dari itu kepentingan publik sepertinya hanya menjadi ruang kecil saja dalam media. Hal ini menunjukkan adanya tekanan antara komitmen sebagai seorang jurnalis dan pekerjaan sebagai seorang pegawai, tekanan tersebut akan selalu ada, karena mengabaikan salah satu dari dua hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2013, p. 69).

Sekeras apapun publik mempertanyakan tentang kredibilitas para jurnalis, mereka juga sebenarnya ada di bawah tekanan dalam bekerja untuk kepentingan media, ironisnya meskipun begitu berita yang sehari-hari hadir di sekeliling kita melalui portal-portal berita online dianggap hal tersebut disajikan oleh jurnalis dengan penuh Komitmen sebagai seorang jurnalis padahal nyatanya kinerja jurnalis yang tunduk kepada pemilik media (sebagai pegawai) menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada jurnalis sebagai sebuah pekerjaan bukan sebagai suatu komitmen. Berita yang dibuat oleh jurnalis akan cenderung subjektif karena mereka menyampaikan tafsir kebenaran dari jurnalisme dan berita tersebut akan dibatasi oleh bagaimana para jurnalis mengkonstruksi realitas.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat bedah yang digunakan dalam penelitian sebagai cara ilmiah untuk memperoleh jawaban dan memecahkan permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Metode penelitian Framing dipilih oleh penulis karena dinilai dapat mencerminkan keterkaitan antara paradigma teori dan objek penelitian secara harmonis.

Merujuk pada tujuan penelitian ini adalah untuk membongkar cara kedua media *online* tersebut yaitu Kompas.com dan Detik.com dalam melakukan *framing* terhadap pemberitaan kritik kartu kuning terhadap Jokowi, yang mana hal ini dapat

diungkap secara ilmiah dengan memperhatikan framing yang dilakukan oleh media meninjau politik pemberitaan yang dilakukan oleh media, ideologi media dan peran media dalam suatu pemberitaan. Berangkat dari tujuan dan faktor-faktor yang dipercaya dapat menjadi perhatian dalam mengungkap hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1.6.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berita-berita tentang Zaadit yang melakukan kritik dengan menggunakan kartu kuning terhadap presiden Jokowi dalam media *online* www.Kompas.com Kompas Gramedia Group yang dimiliki oleh Jacob Oetama dan www.detik.com Trans Corpora milik Chairul Tanjung

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aspek tertentu dari sebuah realitas yang dibingkai oleh Kompas dan Detik menjadi sebuah berita yang kemudian menjadi realitas media dalam hal ini mengenai kritik kartu kuning yang dilakukan oleh Zaadit terhadap Presiden Jokowi. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2006, p. 68).

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dengan paradigma atau pendekatan konstruksionis yang memandang bahwa tidak ada realitas yang obyektif, karena realitas tercipta melalui proses konstruksi dan pandangan tertentu.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penulis berdasarkan kebutuhan analisis dan pengkajian. Pengumpulan data tersebut sudah dilakukan sejak penulis menentukan permasalahan apa yang dikaji. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan seleksi terhadap berita-berita terkait kritik kartu kuning terhadap Presiden Jokowi oleh Zaadit Taqwa pada bulan februari 2018 di www.Kompas.com dan www.detik.com sebagai data primer, sedangkan data sekunder sebagai bahan acuan penelitian didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, tesis (Sugiyono, 2010) berikut adalah berita-berita dalam bentuk tabel :

Tabel 1.1 Judul Berita Kartu Kuning Jokowi Kompas.com

NO	Judul Berita	Tanggal dan Waktu Terbit
1.	Acungkan Buku Kuning di Depan Jokowi, Ketua BEM UI Dibawa Paspampres	02 Februari 2018 pukul 13:53 WIB

2.	Ini Alasan Ketua BEM UI Acungkan “Kartu Kuning” ke Jokowi	02 Februari 2018 Pukul 14:51 WIB
3.	Diberi “Kartu Kuning” di UI, Jokowi Tidak Tersinggung	02 Februari 2018 Pukul 14:45
4.	Cerita Ketua BEM UI Nekat Kartu Kuning Jokowi dan Diamankan Paspampres	02 Februari 2018 Pukul 18:06 WIB
5.	Kartu Kuning untuk Jokowi Dianggap Ekspresi Galau Mahasiswa	03 Februari 2018 Pukuul 17:53 WIB
6.	“Kartu Kuning” kepada Jokowi Dianggap Cara Kritik yang Efektif	02 Februari 2018 Pukul 22:13 WIB
7.	Amien Rais Puji Aksi Ketua BEM UI Beri Kartu Kuning untuk Jokowi	07 Februari 2018 Pukul 17:56 WIB
8.	“Kartu Kuning” Jokowi Disinggung dalam Pembahasan Pasal Penghinaan Presiden	05 Februari 2018 Pukul 19:35 WIB
9.	UI: Aksi Kartu Kuning Sambil Meniup Peluit untuk Jokowi Murni Aspirasi Pribadi	02 Februari 2018 Pukul 15:32 WIB
10.	Acungkan “Kartu Kuning” dan Tiup Peluit di Depan Jokowi, Zaadit Tak Kena Sanksi	02 Februari 2018 Pukul 18:37 WIB

11.	Jokowi: Saya Akan Kirim BEM UI Asmat biar Lihat Medan di Sana	03 Februari 2018 Pukul 20:44 WIB
12.	Diberi “Kartu Kuning” di UI, Jokowi Tidak Tersinggung	02 Februari 2018 Pukul 14:45 WIB
13.	Gara-gara “Kartu Kuning”. Pertemuan Jokowi dengan BEM UI Batal	02 Februari 2018 Pukul 15:11 WIB
14.	Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah unuk Jokowi	07 Februari 2018 Pukul 18:26 WIB
15.	Kartu Kuning Juga Dinilair sebagai Peringatan bagi Elektabilitas Jokowi	03 Februari 2018 Pukul 14:34 WIB
16.	Peringatan BEM UI unuk Jokowi	03 Februari 2018 Pukul 08:40 WIB
17.	Habis Kartu Kuning, PDI-P Yakin Terbit Kartu Hijau unuk Jokowi	05 Februari 2018 Pukul 17:51 WIB
18.	Ini Alasan etua BEM UI Acungkan “Kartu Kuning” ke Jokowi	17 Februari 2018 Pukul 07:07 WIB
19.	Setelah Kartu Kuning Ketua BEM UI, Fahri Hamzah Keluarkan Kartu Merah	03 Februari 2018 Pukul 12:06 WIB

20.	Kata Menristek Dikti soal aksi “Kartu Kuning” Ketua BEM UI	05 Februari 2018 Pukul 16:07 WIB
21.	Fadli Zon Bikin Puisi “Sajak Peluit Kartu Kuning”	05 Februari 2018 Pukul 10:54 WIB
22.	Fahri Hamzah Berharap anis Mata Maju jadi Capres RI	03 Februari 2018 Pukul 17:07 WIB
23.	Setelah Kartu Kuning Keteua BEM UI, Fahri Hamzah Keluarkan Kartu Merah	03 Februari 2018 Pukul 12:06 WIB
24.	Mendagri Anggap Aksi Ketua BEM UI Tak Hormati Presiden Jokowi	03 Februari 2018 Pukul 19:24 WIB
25.	Keluarkan Kartu Merah, Siapa yang Disindir Fahri Hamzah?	03 Februari 2018 Pukul 13:20 WIB
26.	Fahri Hamzah: Sama Saja Presiden Menganggap Dirinya Pejajah	07 Februari 2018 Pukul 10:07 WIB
27.	“Kartu Kuning” Jokowi Disinggung dalam Pembahasan Pasal Penghinaan Presiden	05 Februari 2018 Pukul 19:35 WIB
28.	“Disentil” Jokowi, BEM UI langsung Galang Donasi untuk Asmat	05 Februari 2018 Pukul 07:21 WIB

29.	8 Anggota BEM UI Terbang ke Asmat, Zaadit Taqwa Tidak Ikut	15 Februari 2018 Pukul 13:31 WIB
-----	---	-------------------------------------

Sumber : www.kompas.com

Tabel diatas adalah judul-judul dari pemberitaan Kartu Kuning Jokowi di media online Kompas.com sebanyak 29 berita pada bulan Februari 2018.

Tabel 1.2 Judul Berita Kartu Kuning Jokowi Detik.com

NO	Judul Berita	Tanggal dan Waktu Terbit
1.	Kartu Kuning BEM UI ke Jokowi, Puan: Mahasiswa Harus Lihat ke Asmat	04 Februari 2018 Pukul 13:42 WIB
2.	Jokowi 'Dikartu Kuning' Mahasiswa UI, Mensos Harusnya Kasih Jempol	02 Februari 2018 Pukul 15:05 WIB
3.	Sindir Ketua BEM UI, Luhut: Sebelum Bertindak Lihat Kondisi Dulu	10 Februari 2018 Pukul 17:46 WIB
4.	Sosok Zaadit Taqwa, Mahasiswa Fisika UI yang 'Kartu Kuning' Jokowi	02 Februari 2018 Pukul 14:40 WIB
5.	BEM UI Protes Aksi #kKartuKuningJokowi Dibubarkan	02 Februari 2018 Pukul 14:28 WIB

6.	BEM UI Ungkap Arti aksi 'Kartu Kuning' buat Jokowi	02 Februari 2018 Pukul 13:38 WIB
7.	Ada Insiden 'Kartu Kuning' Jokowi Batal Temui Bem UI	02 Februari 2018 Pukul 12:02 WIB
8.	Mahasiswanya Acungkan 'Kartu Kuning' ke Jokowi, Ini Penjelasan UI	02 Februari 2018 Pukul 11:54 WIB
9.	Mahasiswa UI Acungkan 'Kartu Kuning', Istana: Jokowi Tak Tersinggung	02 Februari 2018 Pukul 11:44 WIB
10.	Acungkan 'Kartu Kuning' ke Jokowi, Mahasiswa UI Dihalau Paspampres	02 Februari 2018 Pukul 11:15 WIB
11.	Arti 'Kartu Kuning' Ketua BEM UI unuk Jokowi	02 Februari 2018 Pukul 20:32 WIB
12.	BEM UI Sebut Aksi 'Kartu Kuning' ke Jokowi Belum ada izin Kampus	02 Februari 2018 Pukul 20:14 WIB
13.	Ketua BEM UI Zaadit Taqwa Luruskan Salah Paham Tweet 'Promosi PKS'	02 Februari 2018 Pukul 18:12 WIB
14.	Aksi Kartu Kuning Jokowi, Mengapa Akun @Zaadit Berganti Nama?	02 Februari 2018 Pukul 17:27 WIB

15.	Ketua BEM UI: Aksi 'Kartu Kuning' untuk Jokowi Bukan Bayaran	02 Februari 2018 Pukul 17:18 WIB
16.	Beri Kartu Kuning ke Jokowi, Ketua Bem UI: Nggak Ada Bukti Saya PKS	02 Februari 2018 Pukul 17:09 WIB
17.	BEM UI Tepis Istana: Tak Ada Kejelasan Pertemuan dengan Jokowi	02 Februari 2018 Pukul 16:32 WIB
18.	Ketua BEM UI Jelaskan soal Aksi 'Kartu Kuning' untuk Jokowi	02 Februari 2018 Pukul 15:51 WIB
19.	Kampus Panggil Zaadit Soal 'Kartu Kuning', BEM UI: Pasti Dipenuhi	04 Februari 2018 Pukul 11:26 WIB
20.	UI akan Panggil Ketua BEM yang Acungkan Kartu Kuning ke Jokowi	03 Februari 2018 Pukul 16:35 WIB
21.	Ketua BEM Kartu Kuning Jokowi, UI: itu Mencoreng Muka Kita Sendiri	03 Februari 2018 Pukul 16:22 WIB
22.	Jokowi Dikartu Kuning Ketua BEM UI, Menristek: Itu Warna Kampusnya	03 Februari 2018 Pukul 15:27 WIB
23.	Fahri minta Jokowi Respons 'Kartu Kuning' dari Ketua BEM UI	03 Februari 2018 Pukul 13:36 WIB

24.	Kritik Pemerintahan Jokowi, Fahri Hamzan Angkat Kartu Merah	02 Februari 2018 Pukul 11:09 WIB
25.	Puji 'Kartu Kuning' Ketua BEM UI ke Jokowi, Fahri: Zaadit adalah Kita	02 Februari 2018 Pukul 22:12 WIB
26.	Universitas Sesalkan Akdi 'Kartu Kuning' ke Jokowi, BEM UI: Wajar	04 Februari 2018 Pukul 11:05 WIB
27.	Soal Aksi 'Kartu Kuning' ke Jokowi, PSI: Diizinkan Dalam Demokrasi	04 Februari 2018 Pukul 11:05 WIB
28.	Jokowi Ingin Kirim ke Asmat, BEM UI: Kami Memang Sudah Ada Rencana	03 Februari 2018 Pukul 19:49 WIB
29.	Jokowi: Mungkin Nanti, Saya Akan Kirim BEM UI ke Asmat	03 Februari 2018 Pukul 18:54 WIB
30.	UI Minta Maaf ke Jokowi soal Aksi Kartu Kuning dari Ketua BEM	03 Februari 2018 Pukul 16:56 WIB
31.	Tolak Dikirim Jokowi ke Asmat, Ketua BEM UI: Kami Pakai Uang Sendiri	06 Februari 2018 Pukul 00:54 WIB
32.	Soal 'Kartu Kuning' BEM UI, PDIP: Jokowi Saja Senyum-senyum	05 Februari 2018 Pukul 17:29 WIB

33.	Bahas Pasal Penghinaan Presiden di RKHUP, PD: Kartu Kuning Termasuk?	05 Februari 2018 Pukul 16:27 WIB
34.	Kartu Kuning Ketua BEM UI, Menristek: Kalau Bertemu Lebih Baik	05 Februari 2018 Pukul 15:47 WIB
35.	Selain BEM UI, Mensos Juga akan Ajak Kampus Lain ke Asmat	05 Februari 2018 Pukul 14:53 WIB
36.	Dukung Ketua BEM UI, Fadli Zon Tulis Sajak Peluit Kartu Kuning	05 Februari 2018 Pukul 08:23 WIB
37.	Kartu Kuning Jokowi dan Gerakan Mahasiswa Berbasis Riset	05 Februari 2018 Pukul 15:02 WIB
38.	Kartu Kuning Sebagai Kritik	08 Februari 2018 Pukul 13:02 WIB
39.	Soal Kartu Kuning ke Jokowi, Haruskah BEM UI ke Asmat Dulu?	07 Februari 2018 Pukul 22:52 WIB
40.	Ketua BEM UI Tegaskan Kartu Kuning ke Jokowi Bukan Aksi Pesanan	04 Februari 2018 21:03 WIB
41.	Ramai Kartu Kuning, Generasi Muda PAN Beri Kartu Hijau unutup Jokowi	07 Februari 2018 Pukul 13:02 WIB

42.	Fadli Zon Siap Nyumbang, BEM UI: Kami Buka Donasi Asmat untuk Umum	07 Februari 2018 Pukul 09:10 WIB
43.	Dokter di Papua: Kartu Kuning untuk Jokowi Salah Alamat	06 Februari 2018 Pukul 18:50 WIB
44.	Dokter di Papua ke BEM UI: Di Asmat, Air Mineral untuk Bilas Daki	06 Februari 2018 Pukul 17:55 WIB
45.	Mensos: Unhas Sudah ke Asmat, Kita Harapkan UI Juga	12 Februari 2018 Pukul 14:56 WB
46.	'Kartu Kuning' untuk Nalar Kritis Warga	13 Februari 2018 Pukul 13:02 WIB
47.	4 Anggota BEM UI Terbang ke Asmat.Zaadit Taqwa Tak Ikut	15 Februari 2018 Pukul 12:01 WIB

Sumber : www.detik.com

Tabel diatas adalah judul-judul dari pemberitaan Kartu Kuning Jokowi pada media online Detik.com sebanyak 47 berita pada bulan Februari 2018.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis *framing*. Dalam hal ini, analisis framing dirasa mampu untuk

membongkar bagaimana Kompas dan Detik melakukan proses pembingkaihan berita kritik kartu kuning terhadap Presiden Jokowi oleh Zaadit.

Menggunakan analisa yang dikembangkan oleh Robert N Entman. Pada mode ini, Entman menjelaskan *framing* adalah proses seleksi isu dan penonjolan pada aspek tertentu yang membuat berita menjadi lebih bermakna, menarik, dan lebih diingat khalayak. Realitas ditayangkan secara lebih menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas (Eriyanto, 2002, p. 222). Peneliti memilih perangkat *framing* Entman dalam penelitian ini dengan argument perangkat *frame* Entman mampu membantu peneliti dalam mendefinisikan masalah kritik kartu kuning terhadap Jokowi yang diungkap oleh media dan memperkirakan penyebab dari masalah itu, perangkat *frame* Entman yang dapat menggambarkan proses seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media dirasa dapat menghasilkan penelitian yang memberi gambaran mengenai isu dan aspek apa yang ditonjolkan oleh kedua media terkait isu tersebut (Sobur, 2009). Selanjutnya, pisau analisa ini akan membantu peneliti dalam mencari tahu makna didalam pembingkaihan berita tersebut.

Analisa dilakukan dengan membaca secara umum dan sekaligus seksama dari kedua media online tersebut, kemudian menganalisis dengan Pandangan Entman, *framing* dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi

penempatan yang lebih besar daripada isu lainnya, dijelaskan oleh Bungin termasuk kedalam analisis teks dan bahasa dengan sebutan teknik analisis bingkai, menurut entman teknik analisis bingkai terdiri dari empat cara (Bungin, 2006, p. 168) yaitu :

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah / isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Tabel 1.3 Perangkat Framing Entman (Eriyanto, 2011, p. 233)

Berita yang sudah diseleksi kemudian diinterpretasi sesuai dengan hasil analisis menggunakan 4 teknik model Robert N. Entman untuk selanjutnya diberi

kesimpulan konteks berita serta *frame* dari kedua media. Pembahasan mengenai konteks berita merupakan hasil dari interpretasi antara temuan penelitian dengan literatur yang digunakan.